

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan karena mengandung sebuah proses yang bisa mendapatkan sebuah informasi yang akurat untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan untuk semua pihak yang membutuhkan. Proses tersebut berkaitan dengan teknologi informasi untuk melihat kemajuan sebuah perusahaan. Maka dari itu sistem informasi akuntansi memudahkan perusahaan dalam melakukan kegiatan sebuah perusahaan.

Romney & Steinbart (2018:10) menyatakan bahwa:

“Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi untuk para pembuat keputusan”.

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Turner, Weickgenannt, & Copeland (2017:4) adalah sebagai berikut :

“Sistem informasi akuntansi meliputi proses , prosedur, mencatat dan mengumpulkan data akuntansi untuk menghasilkan sebuah informasi yang terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum untuk dilaporkan ke pengguna internal maupun eksternal”.

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2017:80) adalah:

“Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan komponen-komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan saling bekerja sama satu sama lain dalam mengolah data transaksi keuangan agar menjadi sebuah informasi keuangan”.

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi dengan melakukan kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses sampai dengan menghasilkan laporan data akuntansi yang dapat digunakan untuk pengguna mengambil keputusan baik pengguna internal maupun eksternal.

2.1.1.2 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Unsur-unsur dalam sistem informasi akuntansi adalah formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan. Berikut ini uraian lebih lanjut mengenai unsur-unsur sistem informasi akuntansi (Mulyadi, 2016:3).

1. Formulir Dokumen yang berfungsi untuk mencatat terjadinya transaksi. Formulir juga disebut dengan dokumen yang berbentuk secarik kertas. Contoh dari formulir yaitu faktur penjualan, bukti kas keluar dan cek.
2. Jurnal Jurnal yaitu catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan, dan data lainnya. Sumber informasi pencatatan dalam jurnal adalah formulir. Contoh dari jurnal yaitu, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal umum.
3. Buku Besar Buku besar (general ledger) terdiri dari akun-akun yang berguna meringkas data keuangan yang telah dicatat pada jurnal sebelumnya. Akun-akun dalam buku besar disediakan sesuai unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
4. Buku Pembantu Buku pembantu ini terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar.
5. Laporan Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang berisi informasi yang merupakan keluaran (*output*) sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak computer ataupun tayangan pada layar monitor computer.

2.1.1.3 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Terdapat enam komponen sistem informasi akuntansi menurut (Romney & Steinbart (2018:11), yaitu :

1. Para pengguna yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi.

Sedangkan komponen sistem informasi menurut Azhar Susanto (2017:207) adalah sebagai berikut:

1. “Perangkat Keras (*Hardware*)
2. Perangkat Lunak (*Software*)
3. Manusia (*Brainware*)
4. Prosedur (*Procedure*)
5. Basis Data (*Database*)
6. Jaringan Komunikasi (*Communication Network*).”

Adapun Penjelasan mengenai komponen sistem informasi menurut Azhar Susanto (2017:207) sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (*Hardware*) merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.
Hardware terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

- a. Bagian input (Input Device) merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukan data ke dalam komputer.
 - b. Bagian pengolah utama dan memori mengolah data dengan cepat dan menyimpannya.
2. Bagian Output (output device) merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk menghasilkan informasi hasil pengolahan data. Perangkat Lunak (*Software*) adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. Pengelompokan *software* meliputi:
- a. *Operating System* (sistem operasi) berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer.
 - b. *Software* aplikasi yang digunakan isinya sesuai dengan keinginan user.
 - c. Perangkat Lunak Aplikasi
- Perangkat lunak aplikasi atau sering juga disebut sebagai ‘paket aplikasi’ merupakan *software* jadi yang siap untuk digunakan.
3. Manusia (*Brainware*) atau sumber daya manusia (SDM) SI/SIA merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi (SI) dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Komponen ini tidak bisa dipisahkan dengan komponen lainnya karena didalam suatu sistem

informasi sebagai hasil perencanaan, analisis, perancangan, dan strategi implementasi pada dasarnya komunikasi diantara sumber daya manusia yang terlihat dalam suatu organisasi. Beberapa kelompok sumber daya manusia dalam organisasi yang terlibat dalam beberapa aktivitas maka dapat dikelompokkan kedalam pemilik dan pemakai sistem informasi:

- a. Pemilik sistem informasi merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Pemilik sistem informasi cenderung berfikir sangat general, tidak detail.
 - b. Pemakai sistem informasi merupakan orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Para pemakai akhir sistem informasi tersebut menentukan:
 - Masalah yang harus dipecahkan
 - Kesempatan yang harus diambil
 - Kebutuhan yang harus dipeuhi, dan
 - Batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi. Mereka juga cukup memperhatikan tayangan aplikasi di komputer baik dalam bentuk form input maupun outputnya.
4. Prosedur (*Procedure*) adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Jika prosedur informasi akuntansi telah diterima maka akan

menjadi sebuah pedoman dari fungsi sistem informasi tersebut harus dioperasikan. Dengan adanya prosedur yang memadai maka pengendalian dapat dilakukan dengan baik.

5. Basis Data (*Database*) Merupakan kumpulan data-data akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pemakai, yang tersimpan didalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau didalam perusahaan. Dengan menentukan terlebih dahulu informasi yang diperlukan. Maka dari itu kebutuhan informasi harus diketahui bagaimana proses untuk menghasilkan sebuah informasi tersebut. Database yang digunakan harus sesuai dengan prosedur yang cocok.
6. Jaringan Komputer dan Telekomunikasi merupakan Komponen-komponen yang digunakan dalam jaringan komunikasi data satu sama lain harus berintegrasi secara harmonis atau bersinergi membentuk jaringan komunikasi data dalam sistem informasi akuntansi. Komponen jaringan komunikasi data yang harus bersinergi misal antara hubungan yang digunakan, saluran komunikasi dan Network Card (LAN 29 Card). Keharmonisan teknologi yang digunakan dalam jaringan komunikasi harus sesuai dengan hardware yang digunakan. Komponen-komponen dan fungsi dari sistem telekomunikasi yaitu :

- a. Fungsi sistem telekomunikasi
- b. Pemroses komunikasi
- c. Software komunikasi

Dengan demikian dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya operator yang menjalankan sistem harus berpedoman pada prosedur-prosedur dan didukung oleh infrastruktur terkonologi seperti software, komputer, dan peralatan pendukung lainnya. Tanpa itu sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik.

2.1.1.4 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi yang baik dalam sebuah pelaksanaan akan memberikan sebuah manfaat dan menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas khususnya untuk pengambilan sebuah keputusan. Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi yang tepat waktu, relevan, akurat, dapat dipercaya, dan lengkap secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung arti dan berguna.

Adapun menurut Susanto (2016:9), fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Mendukung aktifitas sehari-hari perusahaan, mendukung proses pengambilan keputusan, dan membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan”.

Romney & Steinbart (2018:11) mengatakan keenam komponen sistem informasi akuntansi diatas memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tiga fungsi bisnis penting, yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti misalnya melakukan penjualan dan pembelian bahan baku dengan proses yang sering dilakukan secara berulang.

2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan personil organisasi.
3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi.

Berdasarkan pernyataan fungsi sistem informasi akuntansi, dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi menjadi pendukung atau menjadi dasar bagi sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan, untuk itu sistem informasi akuntansi harus disusun atau dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi dengan baik. Sistem informasi juga dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dengan menyediakan beberapa cara untuk memecahkan masalah dari data yang akurat. Maka dari itu sistem informasi akuntansi harus dirancang sebaik mungkin untuk mengantisipasi kebutuhan informasi dalam berbagai situasi.

2.1.1.5 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam memenuhi kebutuhan informasi baik untuk kebutuhan pihak internal maupun pihak eksternal, sistem informasi harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian. Sistem informasi akuntansi bertujuan menyediakan informasi akuntansi kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2016:15) adalah:

1. Menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
3. Menilaian pengawasan internal dan akuntansi, dengan menyempurnakan tingkat kebenaran informasi akuntansi, menyajikan catatan lengkap terkait pertanggungjawaban serta proteksi kekayaan entitas.
4. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

2.1.1.6 Manfaat Pengguna Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi memberikan manfaat bagi penggunanya baik pengguna internal maupun pengguna eksternal sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Menurut Romney & Steinbart (2018:11) sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat serta menambah nilai untuk organisasi dengan:

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan.
2. Meningkatkan efisiensi.
3. Berbagi pengetahuan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya.
5. Memperbaiki struktur pengendalian internal.
6. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.7 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Kualitas informasi merujuk pada informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Agar sistem informasi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, maka dituntut untuk dapat menyajikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Menurut Romney & Steinbart (2016:12) mengemukakan kualitas sistem informasi akuntansi yaitu:

“Indikasi dari kualitas sistem informasi akuntansi adalah mengurangi ketidakpastian mendukung keputusan, dan mendorong lebih baik dalam hal perencanaan aktivitas kerja. Pembuatan keputusan oleh manajemen akan menjadi lebih baik apabila semua faktor sudah dipertimbangkan, maka manajemen mempunyai risiko yang lebih kecil untuk membuat kesalahan dalam pembuatan keputusan”.

Menurut Azhar Susanto (2013:14) kualitas sistem informasi akuntansi yaitu:

“Kualitas sistem informasi akuntansi merupakan integritas semua unsur dan sub unsur yang terkait dalam membentuk sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas”.

Menurut DeLone dan McLean dalam Istianingsih dan Utami (2009) sebagai berikut:

“Kualitas sistem informasi akuntansi berarti focus pada performa sistem informasi akuntansi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan prosedur yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang terdiri dari kemudahan untuk digunakan (*ease to use*) kemudahan untuk diakses (*flexibility*), dan keandalan sistem (*reliability*)”.

2.1.1.8 Dimensi Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Dimensi dari kualitas sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2018:9) yaitu:

1. Efisiensi (*Efficiency*)
2. Kemudahan Akses (*Accessibility*)
3. Integritas (*Integration*)

Adapun penjelasan dari 3 (tiga) dimensi kualitas sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi (*Efficiency*)

Dimensi efisiensi merupakan dimensi sistem informasi akuntansi yang digunakan sumber daya yang optimal.

2. Kemudahan Akses (*Accessibility*)

Dimensi ini merupakan kualitas sistem informasi akuntansi dimana informasi yang diperlukan dapat diakses dengan mudah dari sistem informasi akuntansi.

3. Integritas (*Integration*)

Dimensi ini merupakan sistem informasi akuntansi dimana semua komponen didalam sistem (*Hardware, software, brainware, database, procedure* dan jaringan komunikasi) bersinergi dalam SIA untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam membantu proses pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Istianingsih (2009) terdapat tahap-tahap dari proses terbentuknya kualitas sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan
2. Kualitas sistem
3. Kualitas informasi

Kualitas sistem informasi akuntansi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan
 - a. *Tangibles* (bukti langsung) yaitu fasilitas fisik, kelengkapan dan peralatan, serta sarana komunikasi.

- b. *Reability* (kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan dengan segera, dan memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
- c. *Responsiveness* (daya tanggap) yaitu sesuai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas,
- d. *Assurance* (jaminan) yaitu pengetahuan yang luas, kesopanan dari karyawan, dan untuk mendapatkan kepercayaan dan keyakinan.
- e. *Empathy* (empati) yaitu suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, yang spesifik serta memiliki waktu yang nyaman bagi pelanggan.

2. Kualitas sistem

- a. *System flexibility* (kemudahan untuk diakses) yaitu untuk memberikan kemudahan dalam menampilkan kembali data-data yang diperlukan dan menampilkannya dalam format yang berbeda.
- b. *Response time* (kecepatan akses) yaitu kecepatan pemrosesan, dan waktu respon.
- c. *Security* (keamanan) yaitu keamanan sistem dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi.

3. Kualitas informasi

- a. *Content* (isi) yaitu kemampuan sistem dalam menyediakan laporan yang informatif sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja, menghasilkan laporan yang tepat, dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. *Accuracy* (keakuratan) yaitu kemampuan sistem informasi akuntansi yang dihasilkan dalam kekurangan informasi.
- c. *Format* (format) yaitu sisi tampilan sistem informasi akuntansi mudah ketika digunakan.
- d. *Ease of use* (kemudahan pemakaian) yaitu suatu sistem informasi akuntansi dapat dikatakan berkuaitas jika sistem tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut.
- e. *Timeliness* (ketepatan waktu) yaitu informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi memiliki ketepatan waktu.

2.1.2 Pencegahan Kecurangan

2.1.2.1 Pengertian Kecurangan

Kecurangan merupakan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara material maupun non material. Pengertian fraud Menurut Hery (2017:63) yaitu:

“Kecurangan adalah salah saji yang disengaja. Kecurangan bisa berupa misapropriasi aset atau disebut juga kecurangan karyawan dan kecurangan pelaporan keuangan atau kecurangan manajemen”.

Weibter's New World of Auditi of Financial Statement mendefinisikan kecurangan adalah:

“*Fraud* merupakan tindakan yang disengaja oleh anggota perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, atau pihak ketiga yang melakukan manipulasi penipuan untuk memperoleh sebuah keuntungan yang tidak adil atau illegal” (kuanti, 2016:18).

Kecurangan menurut Johnstone et al (2014:34) yaitu:

“*Fraud is an intentional act involving the use deception that result in a material misstatement of the financial statements*”

“*Fraud* adalah tindakan yang disengaja melibatkan pelaku yang menghasilkan bahan salah saji laporan keuangan”.

Amin Widjaja Tunggal (2016:1) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

"Fraud didefinisikan sebagai konsep hukum yang luas. Fraud menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja dengan maksud untuk merebut aset atau hak orang lain atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai kesalahan yang disengaja dalam laporan keuangan. Laporan. Terutama dibagi menjadi dua kategori: laporan keuangan yang mengandung kecurangan dan penyalahgunaan aset".

2.1.2.2 Faktor Penyebab Kecurangan



Gambar 2.1 Fraud Triangle

Menurut SAS 99 (AU 316) yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2016:4) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*, yaitu:

1. Opportunity (kesempatan) Merupakan faktor yang seluruhnya berasal dari luar individu yaitu berasal dari sebuah organisasi, menjadi korban penipuan. Kesempatan penipuan selalu ada di setiap lokasi dengan orang yang bertanggung jawab, sipelaku merasa punya kesempatan keuntungan, menggunakan dan dilengkapi dengan sistem kendali organisasi yang kurang memadai.
2. Pressure (Tekanan) Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor pendorongnya seseorang berani melakukan penipuan (fraud). Asal usul faktor ini berasal dari individu pelaku yang merasakan tekanan hidup sangat sulit, memaksa dirinya untuk melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan besar pribadi. Ini biasanya terjadi karena manfaat dia di perusahaan atau organisasi lebih sedikit pekerjaan atau mode hidup dalam kemewahan membuat para pelaku terus menerus merasa kekurangan. Namun tekanan tersebut bisa juga datang dari lingkungan tempatnya bekerja. Seperti: lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, perasaan karyawan perlakuan adil, ada proses penerimaan yang tidak adil.
3. Ratiobalization (Rasionalisasi) Pelaku berpikir bahwa dia memiliki alasan yang baik sebagai dasar bukti apa yang dia lakukan. Dan mempengaruhi pihak lain setuju dengan apa yang dia lakukan. "

2.1.2.3 Jenis-jenis kecurangan

Menurut Association of Certified Fraud Examination (ACFE) dalam Diaz (2014:68), kecurangan terbagi menjadi tiga bagian;

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)
2. Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*Fraudulent Statment*)
3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis-jenis kecurangan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Asset Misappropriation meliputi penyalahgunaan, penggelapan, atau pencurian aset atau harta perusahaan oleh pihak didalam dan/ atau pihak diluar perusahaan. Fraud jenis ini merupakan bentuk fraud yang klasikal dan seharusnya paling mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud (*tagible*) atau dapat diukur dan dihitung (*defined value*). Pengungkapan *Asset Misappropriation* dilakukan dengan mengkombinasikan teknik auditing dengan teknik investigasi. Kedua teknik tersebut memiliki porsi yang seimbang dalam penanganan kasus *Asset Misappropriation*. *Asset Misappropriation* seringkali diidentikkan sebagai employee fraud atau fraud yang dilakukan oleh pegawai sebab mayoritas pelaku *Asset Misappropriation* memang berada pada tingkat atau kedudukan sebagai pegawai.

2. Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent Statement seringkali diidentikkan sebagai management fraud atau fraud yang dilakukan oleh manajemen sebab mayoritas pelaku memang berada pada tingkat atau kedudukan di lini manajerial (pejabat atau eksekutif manajer senior). *Fraudulent Statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif dan manajer senior suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) atau mempercantik penyajian laporan keuangan guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi mereka terkait dengan kedudukan dan tanggung jawabnya. *Fraudulent Statement* mungkin dapat dianoligkan dengan istilah *window dressing*,

financial shehanigans (permainan gila finansial,) *accounting gimmicks* (tipu muslihat akuntansi), *cooking the books* (memasak pembukuan), *illegal earning management* (manajemen laba yang tidak sah), *income smoothing* (perataan laba). Pengungkapan dan pendeteksian *fraudulent statement* sangat membutuhkan kecakapan auditing dan akuntansi. Meskipun tipologi kedua ini paling banyak berkaitan dengan pelaporan keuangan yang dibuat salah atau menipu, namun sebenarnya ACFE menekankan bahwa pelaporan kinerja operasional, permohonan kredit, prospektus atau pernyataan publik (*press release*) yang dibuat untuk mengelabui orang lain guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi termasuk *fraudulent statement*.

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau kolusi, fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisma). Termasuk didalam jenis korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*confilct of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/legal (*illegal gratuities*) yang lebih dikenal sebagai hadiah dan gratifikasi yang terkait dengan hubungan kerja dan jabatan, dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) atau dikenal sebagai pungutan liar atau upeti untuk mengungkap korupsi, auditor seharusnya memiliki keterampilan dan pengalaman melakukan investigasi sebab porsi teknik investigasi dalam mengungkap korupsi lebih dominan ketimbang audit.

2.1.2.4 Tanda-Tanda Kecurangan

Kecurangan atau fraud dapat di ketahui melalui sinyal atau tanda-tanda yang diberikan bahwa telah terjadi tindak kecurangan dalam perusahaan. Menurut W. Steve Albrecht dalam bukunya *Fraud Examination* yang dikutip oleh Karyono (2013:95) ada enam jenis tanda-tanda fraud yaitu sebagai berikut:

1. Keganjilan Akuntansi (*Accounting Anomalies*)

Penyimpangan akuntansi karena adanya rekayasa dari pelaku, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat terdeteksi dari akuntansinya.

2. Kelemahan Pengendalian Internal

pengendalian internal bertujuan untuk memastikan keselamatan properti organisasi. Jika pengendalian internal tidak berfungsi dengan baik sebagai alat kontrol yang efektif, kemungkinan besar akan terjadi penipuan.

3. Penyimpangan Analisis

Metode berikut dapat digunakan untuk memahami tanda-tanda penipuan berbagai bentuk analisis:

- a. Analisis vertikal adalah analisis hubungan antar proyek internal Laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas) Tahun lalu dan tahun ini dinyatakan sebagai persentase.
- b. Analisis horizontal adalah analisis persentase perubahan item laporan keuangan dilakukan dalam beberapa periode pelaporan.
- c. Analisis rasio adalah perbandingan item-item dalam laporan keuangan Seperti rasio kas, rasio cepat, rasio lancar (Rasio saat ini).
- d. Analisis hasil adalah perbandingan antara hasil produk jadi dan produk bahan bakunya

4. Gaya Hidup Berlebihan

Tekanan ekonomi adalah salah satu alasan niat penipuan. Setelah penipuan berhasil, gaya hidup pelaku sudah menjadi gaya hidup mewah, hal ini terlihat dari hasil penelitian tertutup (diam-diam) sampai pada fakta pelaku ternyata:

- a. Hidupnya sangat boros.
- b. Hidupnya konsumerisme dan dia suka membeli barang mewah bahkan jika pendapatan resminya tidak memungkinkan untuk berbelanja seperti itu. Karena itu, gaya hidup yang berlebihan merupakan salah satu tandanya ada penipuan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.

5. Kelakuan Tidak Biasa

Perilaku tidak normal atau menyimpang karena internal dan adanya rasa ketakutan, perilaku tidak demikian ini biasanya merupakan tanda penipuan.

6. Pengaduan

Adanya keluhan tentang kegiatan pelayanan organisasi atau karyawan hanya dianggap sebagai gejala karena keluhan belum tentu benar. Keluhan pihak ketiga mungkin hanya untuk keuntungan pribadi karyawan yang mengeluh tentang kecemburuan atau masalah pribadi lainnya.

2.1.2.5 Pengertian Deteksi Kecurangan

Pada dasarnya sistem pengendalian internal dapat mendeteksi adanya kecurangan. Karena terdapat instruksi pendahuluan dan rencana yang baik untuk mengungkap segala sesuatu tentang kemungkinan terjadinya kecurangan, maka bagian pengendalian intern harus memiliki intuisi yang tajam untuk memahami berbagai bagian internal perusahaan yang rawan terjadinya kecurangan. Aspek deteksi kecurangan adalah tindakan untuk mengetahui telah terjadi kecurangan, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan penyebabnya. Kunci dari deteksi penipuan adalah untuk dapat menemukan kesalahan dan penyimpangan. Studi ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mendeteksi penipuan berarti proses menemukan atau mengidentifikasi tindakan ilegal yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian yang disengaja dalam laporan keuangan. Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud* adalah dengan mencari tanda, signal atau *red flag* yang diduga menyebabkan terjadinya *fraud* atau dapat menyebabkan terjadinya *fraud*. Pendeteksian kecurangan menurut Valery G Kumaat (2011:156) sebagai berikut:

“Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan kecurangan, sekaligus mempersempit ruang

gerak para pelaku keurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)”.

Berdasarkan definisi di atas, jelas bahwa deteksi kecurangan merupakan deteksi awal yang harus dilakukan untuk mencegah kecurangan dan menentukan perlu atau tidaknya suatu pengujian. Deteksi ini bisa dilakukan relatif cepat, tapi harus butuh kesabaran berbulan-bulan. Menurut Valer G Kumaat (2011:156) menyimpulkan bahwa cepat atau lambatnya pendeteksian kecurangan bergantung pada:

1. Faktor di pihak pelaku, yaitu kemampuan menyiasati sistem atau menutup celah dari praktek fraudnya, sehingga menentukan tingkat kerumitan suatu tindakan fraud.
2. Faktor yang ditentukan oleh kapasitas audit sendiri yaitu kemampuannya mengembangkan audit berbasis resiko (*risk based audit*) dan membangun jaringan informasi (*audit intelligent*) dengan tetap bersikap hati-hati.

2.1.2.6 Langkah-langkah Mendeteksi Kecurangan

Menurut Priantara (2013: 211-212) Langkah-langkah mendeteksi kecurangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam deteksi penipuan adalah memahami aktivitas organisasi dan serta pahami semua departemen bisnis. Pelajari tentang aktivitas organisasi, termasuk personel berpengalaman wawancara dalam tim inspeksi, dan organisasi. Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat ditentukan apakah organisasi tersebut memiliki menerapkan kontrol dan implementasi. Pengendalian Internal tidak hanya dapat mencegah kecurangan, tetapi juga dapat dirancang untuk deteksi penipuan lebih awal.
2. Langkah selanjutnya dalam mendeteksi penipuan adalah memahami tanda-tanda penyebab penipuan. Penyebab dengan segala macam keanehan, dan penyimpangan dari keadaan dan kelemahan pengendalian internal. Tanda-tanda ini berasal dari berbagai macam informasi, tetapi hasilnya masih tanda-tanda umum yang masih harus dianalisis dan dievaluasi. Jika ada tanda-tanda yang kuat, lakukanlah investigasi gejala-gejala ini.
3. Langkah berikutnya diselesaikan melalui poin-poin penting dari *critical point of auditing* dan teknis analisis sensitivitas. Kunci untuk mengaudit adalah teknis mendeteksi penipuan dengan mengaudit catatan akuntansi menyebabkan gejala atau mungkin

terjadi. Teknis analisis aensitivitas Ini adalah teknis deteksi penipuan berdasarkan analisis berikut: Mencari aktor potensial. analisis ditampilkan di lokasi tertentu apakah ada kemungkinan penipuan dan apa yang harus dilakukan lengkap.

2.1.2.7 Pengertian Pencegahan Kecurangan

Kasus kecurangan yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Apabila fraud tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan. Untuk itu, manajemen perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan.

Menurut Karyono (2013:47), pencegahan kecurangan adalah:

“Pencegahan kecurangan merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:59), pencegahan kecurangan (fraud) adalah:

“Pencegahan penipuan adalah pekerjaan yang komprehensif hal tersebut dapat mengurangi terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*.”

Penipuan adalah masalah bagi perusahaan dan keharusan mencegah sejak dini Amin Widjaja Tunggal (2012:59) mengemukakan beberapa tata kelola untuk mencegah fraud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. "Budaya Kejujuran dan Etika Tinggi Beberapa faktor yang membentuk budaya moral yang jujur dan luhur, yaitu:
 - a. Menetapkan *tone at the top*

Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab atas ditetapkan "*tone at the top*" untuk perilaku moral dalam perusahaan. Kejujuran dan integritas manajemen meningkatkan karyawan selama proses

berlangsung organisasi. Berdasarkan kejujuran dan Integritas akan menjadi dasar dari kode etik detail lebih lanjut dapat dikembangkan untuk disediakan pedoman perilaku yang lebih spesifik diperbolehkan dan dilarang.

b. Ciptakan lingkungan kerja yang positif

Dari penelitian yang dilakukan, terlihat pelanggaran yang lebih banyak ini jarang terjadi ketika karyawan merasa positif tentang bos mereka, bukan tentang perasaan mereka diperalat, diancam atau diabaikan. Tempat kerja aktif dapat meningkatkan semangat kerja karyawan mengurangi kemungkinan kecurangan karyawan menentang perusahaan.

c. Pekerjakan dan promosikan karyawan yang tepat untuk berhasil mencegah penipuan, perusahaan dikelola menerapkan strategi pemfilteran dengan benar, kemungkinan perekrutan dan mempromosikan orang-orang kejujuran yang rendah, terutama mereka yang akan memegang posisi yang sama bertanggung jawab atau penting.

d. Pelatihan

Semua karyawan baru harus menerima pelatihan yang diinginkan perilaku etis karyawan perusahaan. Karyawan harus tahu penipuan laporannya metode yang sebenarnya atau dicurigai dan sesuai yang dikirimkan. Selain itu, pelatihan kewaspadaan pemberantasan penipuan juga harus beradaptasi dengan tanggung jawab pekerjaan khusus juru tulis.

e. Konfirmasi

Beberapa perusahaan mengharuskan karyawan untuk secara periodik bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan secara teratur kode etik. Karyawan harus menyatakan mereka memahami ekspektasi perusahaan dan ikuti kode etik, mereka tidak mengetahui adanya pelanggaran. Konfirmasi semacam itu akan membantu memperkuat kebijakan dan bantuan kode etik mencegah karyawan melakukan penipuan atau pelanggaran etika lainnya.

2. Tanggung jawab manajemen untuk evaluasi pencegahan tidak mungkin terjadi tanpa adanya peluang, maka penipuan tidak mungkin dilakukan. Pengelolaan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah penipuan, serta mengambil langkah pasti untuk mencegahnya penipuan, dan pemantauan untuk mencegah dan menghentikan identifikasi penipuan.

3. Pengawasan oleh Komite Audit

Komite audit terutama bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan dan proses pengendalian internal organisasi. Saat komite audit melakukan tugas ini mempertimbangkan kemungkinan mengabaikan pengendalian internal manajemen

bertanggung jawab dan mengawasi proses pencegahan penipuan manajemen dan prosedur serta pengendalian anti penipuan. Komite audit juga membantu menciptakan "*tone at the top*" yang efektif tentang pentingnya perilaku etis yang jujur dan mendukung manajemen tidak memiliki toleransi terhadap penipuan. "

Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud*, karena setiap tindakan *fraud* dapat terdeteksi secara cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak.

2.1.2.8 Tujuan Pencegahan kecurangan

Salah satu cara memberikan kesempatan kepada bagaian pengendalian internal untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud yang mungkin terjadi didalam lingkungan perusahaan. Apabila teknik pencegahan fraud berjalan dengan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi perusahaan karena meningkatnya kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Fraud merupakan masalah yang ada didalam lingkungan perusahaan, dan harus dicegah sedini mungkin. Selain itu Amin Widjaja Tunggal (2012:33) memaparkan tujuan pencegahan kecurangan yaitu:

1. "Ciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu
2. Proses rekrutmen yang jujur
3. Pelatihan *fraud awareness*
4. Lingkup kerja yang positif
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati
6. Tanamkna kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal".

Adapun penjelasan dari tata kelola pencegahan kecurangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan saling membantu.

Penelitian telah menunjukkan metode pencegahan yang paling efektif penipuan adalah menerapkan prosedur dan kontrol anti penipuan berdasarkan nilai-nilai yang di anut perusahaan. Nilai-nilai tersebut menciptakan lingkungan mendukung perilaku dan harapan yang dapat diterima, karyawan dapat menggunakan nilai ini untuk memandu tindakan mereka. Nilai-nilai ini membantu menciptakan budaya Kejujuran, keterbukaan dan saling membantu antar anggota organisasi atau perusahaan. Keterbukaan antar anggota organisasi adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap perusahaan juga membantu perkembangan perilaku dan manajemen sumber daya manusia yang kompeten profesi yang efektif. Selain jujur dan terbuka, perusahaan berhasil dicegah penipuan tidak hanya bergantung pada hasil pekerjaan pribadi, tapi untuk kesuksesan tim (kerjasama). Suatu organisasi dibentuk sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh sekelompok orang yang membentuk atau menjadi anggota dalam organisasi, dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, orang-orang tersebut terkait dalam lingkungan masyarakat dan berarti mereka saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling membantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya.

2. Proses rekrutmen yang jujur

Untuk membangun lingkungan pengendalian yang positif, rekrutmen merupakan awal masuknya orang-orang yang diseleksi melalui seleksi yang ketat dan efektif untuk mengurangi kemungkinan perekrutan dan promosi orang dengan tingkat kejujurannya rendah. Hanya mereka yang dapat memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diterima. Kebijakan ini mencakup pemeriksaan latar belakang seseorang yang dianggap dipekerjakan atau dipromosikan untuk menduduki jawaban yang bertanggung jawab. Pemeriksaan latar belakang, verifikasi akademik, catatan sejarah pekerjaan, dan surat rekomendasi pribadi dari calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Selain itu, seluruh karyawan harus selalu dilatih tentang nilai-nilai dan kode etik perusahaan harus selalu diterapkan. Dalam performance review, termasuk evaluasi kontribusi karyawan / individu yang membangun lingkungan kerja yang positif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, selalu melakukan evaluasi objektif atas kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan dan standar perilaku, serta setiap pelanggaran ditangani segera.

3. Pelatihan *fraud awareness*

Semua pegawai harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberitahu tentang tugasnya untuk menyampaikan *fraud actual* atau yang dicurigai serta

cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu, pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu. Pelatihan keterampilan dan pengembangan karir tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar tidak terjadi banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Berikut merupakan serangkaian pelatihan yang perlu diperhatikan dan diterapkan pada setiap karyawan perusahaan secara eksplisit agar dapat mengadopsi harapan-harapan yang baik untuk perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban-kewajiban mengkonsumsi masalah-masalah tertentu yang dihadapi.
 - b. Membuat daftar jenis-jenis masalah.
 - c. Cara mengkonsumsi masalah-masalah tersebut dan adanya kepastian dari manajemen mengenai harapan tersebut.
4. Lingkungan kerja yang positif

Dari beberapa riset yang telah dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka dari pada karyawan diperlakukan tidak baik, seperti diperalat, diancam, atau diabaikan. Pengakuan dan sistem penghargaan sesuai dengan sasaran dan hasil kinerja, kesempatan yang sama bagi semua pegawai, program kompensasi secara profesional, pelatihan secara

professional, dan proiritas organisasi dalam pengembangan karir akan menciptakan tempat kerja yang nyaman dan positif. Tempat kerja yang nyaman dan positif dapat mendongkrak semangat kerja karyawan dan dapat mengurangi kemungkinan pegawai melakukan tindakan curang terhadap perusahaan.

5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati

Kode etik biasanya selalu sejalan dnegan moral manusia dan merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Membangun budaya jujur, keterbukaan, dan memberikan program bantuan tidak dapat diciptakan tanpa berlakunya aturan perilaku dank ode etik dilingkungan perusahaan. Dalam hal ini, harus dibuat kriteria yang termasuk perilaku jujur dan tidak jujur serta perbuatan yang diperbolehkan dna dilarang. Smeua kriteria ini dibuat secara tertulis dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai dna harus menyetujui dengan membubuhkan tandatangan. Pelanggaran atas aturan perilaku kode etik harus dikenakan sanksi.

6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan

Masalah kesulitan pastikan akan dialami oleh seluruh pegawai pada setiap perusahaan, sehingga tidak sedikit ddari mereka melakukan tindakan kecurangan agar keluar dari masalah yang dihadapinya. Bentuk bantuan perusahaan harusnya dapat diberikan agar mencegah terjadinya kecurangan terhadap keuangan perusahaan, serta menjadi

dukungan solusi dalam menghadapi permasalahan dan desakan ekonomi yang dimiliki para pegawai sehingga meminimalisir kerugian perusahaan akibat kecurangan.

7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi

Strategi dalam mencegah kecurangan yang terakhir adalah menanamkan kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi. Pihak perusahaan, khususnya pihak manajemen perusahaan harus benar-benar menanamkan sanksi, yaitu dengan membuat dan menjalankan peraturan terhadap setiap tindak kecurangan sehingga perbuatan menyimpang dalam perusahaan dapat meminimalisir dan memberikan efek jera terhadap oknum yang akan ataupun sudah melakukan tindakan kecurangan.

Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Oleh karena itu, perlu kerja sama yang baik bersama-sama setiap anggota organisasi perusahaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan perusahaan. Apabila suatu perusahaan berkembang dan maju, maka seluruh karyawan dalam perusahaan akan sejahtera. Jika seluruh karyawan sejahtera, maka mereka akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Jika seperti itu, maka moral dan etika mereka akan lebih baik.

2.1.2.9 Metode Pencegahan Kecurangan

Metode pencegahan kecurangan yang lazim ditetapkan menurut Karyono (2013:48) yaitu:

- a. Mencegah kecurangan dengan menerapkan kendali intern yang andal.

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris atau entitas, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan tujuan beberapa kategori yaitu efektifitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketepatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- b. Mencegah kecurangan menurut teori *Triangle Fraud*.

Menurut segitiga *fraud* faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Untuk mencegahnya diperlakukan langkah-langkah untuk meminimalisir sebab terjadinya yaitu:

1. Mengurangi “tekanan” situasional yang menimbulkan kecurangan
2. Mengurangi “kesempatan” melakukan kecurangan
3. Mengurangi “pembenaran” melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai.

- c. Mencegah kecurangan menurut *Gone Theory*

Faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah keserakahan, kesempatan, dan pengungkapan.

1. Keserakahan (*greeds*) berkaitan dengan moral dan perilaku serakah yang secara potensial ada pada setiap orang. Untuk mencegah agar keserakahan tersebut dapat diminimalisir antara lain dilakukan dengan:
 - Mendorong pelaksanaan umat menjalankan ibadah agama secara benar.
 - Perbaiki sistem pendidikan
 - Peningkatan fasilitas umum diantaranya transportasi pembersihan atau penerapan secara konsisten kode etik pegawai.
2. Kesempatan (*Opportunity*) berkaitan dengan adanya keadaan organisasi yang kondisi pengendaliannya lemah dapat saja terjadi tindak kecurangan apapun karena lemahnya struktur pengendalian internalnya. Untuk mencegahnya dengan:
 - Peningkatan kualitas pengendalian internal
 - Peningkatan keteladanan dari semua individu
 - Mengembangkan kepemimpinan yang tangguh
 - Menetapkan etika dan aturan perilaku bagi setiap profesi yang merupakan batasan setiap profesi dalam bekerja.

3. Kebutuhan (*Needs*) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang layak untuk mengatasi:
 - Perbaikan pendapatan gaji yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja.
 - Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan.
 - Sistem kinerja dan penghargaan yang wajar sehingga karyawan merasa diperhatikan secara adil.
4. Pengungkapan (*Exposure*) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi hukum bagi pelaku kecurangan. Agar tercipta konsekuensi hukum yang tegas, antara lain perlu dilakukan:
 - Pelaksanaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kecurangan.
 - Bentuk pranata hukum yang tegas.
 - Penyebarluasan produk hukum.

2.1.3 Pengendalian Internal

2.1.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting untuk perusahaan karena untuk mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Menurut COSO (2013:3) pengendalian internal (*internal control*) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internalis a process, effected by an entity’s boar of directors, manage-ment, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”.

Menurut COSO tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan proses, karena hal itu pengendalian internal dapat menyediakan

keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal dirancang dan dioperasikan hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak sepenuhnya mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah disusun dengan sebaik baiknya.

Adapun menurut Supriyono (2016:147) pengendalian internal yaitu:

“Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan seluruh metode yang digunakan dalam suatu bisnis perusahaan untuk melindungi aset-aset, memeriksa dan keadilan data akuntansi”.

Pengertian pengendalian internal menurut Hery (2014:11), yaitu:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan dari berbagai bentuk penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akuntansi perusahaan yang akurat tersedia, dan bahwa semua undang-undang atau persyaratan undang-undang (peraturan) dan kebijakan manajemen telah dipatuhi atau diterapkan dengan benar. Semua karyawan perusahaan ”.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah seperangkat prosedur yang dikoordinasikan untuk menjaga asset-aset serta sesuai dengan hukum/undang-undang dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan.

2.1.3.2 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang dilakukan perusahaan untuk mendorong daya efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Pengendalian internal perusahaan untuk membantu organisasi lebih berhasil dalam mencapai tujuan perusahaan dan juga dapat mengontrol aspek biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan.

Menurut COSO (2017:3) dalam framework terbarunya menyatakan mengenai tujuan-tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“The Framework provides for three categories of objectives, which allow organizations to focus on differing aspects of internal control:

1. *Operations Objectives: These pertain to effectiveness and efficiency of the entity’s operations, including operational and financial performance goals, and safeguarding assets against loss.*
2. *Reporting Objectives: These pertain to internal and external financial and non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness, transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized standard setters, or the entity’s policies.*
3. *Compliance Objectives: These pertain to adherence to laws and regulations to which the entity is subject.”*

Pernyataan diatas memiliki arti bahwa tujuan-tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

Kerangka ini menyediakan kategori tujuan, yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada begbagai aspek pengendalian internal:

1. Tujuan Operasional: Ini berkaitan dengan keefektifan dan efisiensi operasi entitas, termasuk sasaran kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga aset dari kerugian.
2. Tujuan Pelaporan: Ini terkait dengan pelaporan keuangan dan nonkeuangan internal dan eksternal dan dapat mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh regulator, pembuat standar yang diakui, atau kebijakan entitas.
3. Tujuan Kepatuhan: Ini berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan yang menjadi subjek entitas.

Menurut Hery (2016:160) tujuan dari pengendalian interal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:

- a. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan), oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan dan

penyelewengan, pencurian dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.

- b. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan untuk memperkecil resiko baik atas disengaja atau tidak disengaja.
- c. Karyawan telah menaati hukum dan peraturan.

2.1.3.3 Fungsi Pengendalian Internal

Menurut Romney & Steinbart (2018:198) menyatakan tiga fungsi penting pengendalian internal yaitu :

1. Preventive Controls

Pengendalian ini merupakan pengendalian internal untuk mencegah masalah sebelum timbul. Contohnya seperti merekrut personil yang terqualifikasi, memisahkan tugas antar karyawan, dan melakukan pengendalian terhadap aset dan informasi.

2. Detective Controls

Pengendalian ini merupakan pengendalian internal untuk menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Contohnya seperti pemeriksaan ulang terhadap perhitungan dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo (trial balance) bulanan.

3. Corrective Controls

Pengendalian internal merupakan berguna untuk mengontrol dan memperbaiki masalah yang ditemukan serta memulihkan kembali dari kesalahan tersebut. Contohnya seperti mempertahankan cadangan dokumen, memperbaiki kesalahan dalam mendata, dan mengirimkan kembali transaksi untuk selanjutnya.

2.1.3.4 Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki unsur-unsur apa yang diperlukan dalam tujuan perusahaan dan saling berhubungan agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai oleh perusahaan. Untuk menciptakan suatu Pengendalian internal yang baik maka harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan.

Menurut COSO (2013:4) dalam *Internal Control-Intergrated Framework (ICIF)* komponen pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan cakupan komponen-komponen Pengendalian internal yang membentuk struktur dan disiplin. COSO (2013:4) menjelaskan komponen lingkungan pengendalian sebagai berikut:

“Lingkungan pengendalian merupakan seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar melaksanakan pengendalian internal diseluruh organisasi”.

Lingkungan pengendalian yang dihasilakn memiliki dampak yang sangat luas pada sistem pengendalian internal. Selanjutnya COSO (2013:7) menyatakan terdapat 5 prinsip yang dapat terwujud dengan baik dalam pelaksanaan pengendalian internal yaitu:

1. Organisasi yang menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
2. Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan menjalankan fungsi pengawasan.
3. Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, kewenangan, dan tanggung jawab yang tepat.

4. Organisasi untuk komitmen manarik, mengembangkan dan mempertahankan individu-individu yang komponen sesuai tujuan.
5. Organisasi meyakinkan individu untuk memahami peran dan tanggung jawab pengendalian internal.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Arens dan Rnadal yang diterjemahkan oleh Hermawan (2008:379) menyatakan bahwa penilaian risiko merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai GAAP. Selanjutnya COSO (2013:7) menjelaskan bahwa ada empat prinsip yang mendukung penilaian risiko adalah sebagai berikut:

1. Organisasi menentukan tujuan agar identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan.
2. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan dan analisis risiko untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Organisasi mempertimbangkan potensi penipuan dalam penilaian risiko.
4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat mempengaruhi pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian memiliki tujuan dan tindakan untuk diterapkan pada fungsi organisasi. Menurut COSO terdapat tiga prinsip yang mendukung aktivitas pengendalian yaitu:

1. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian tujuan.
 2. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian internal atas teknologi untuk pencapaian tujuan.
 3. Organisasi menyebarkan kegiatan pengendalian internal melalui kebijakan dan prosedur yang menerapkan kebijakan menjadi tindakan.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sebagaimana dinyatakan oleh COSO bahwa informasi sangat penting bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya COSO (2013:7) menegaskan tiga prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal yaitu:

1. Organisasi menghasilkan informasi yang relevan serta berkualitas tinggi.
2. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal.

3. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal.

5. Aktivitas Pengawasan (*Monitoring Activities*)

COSO (2013:4) menjelaskan aktivitas pengawasan merupakan kegiatan evaluasi yang sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya untuk memeriksa dari 5 komponen apakah pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dari setiap komponen. Selanjutnya ada dua prinsip dalam mendukung aktivitas pengawasan yaitu:

1. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan.
2. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal.

2.1.3.5 Keterbatasan Pengendalian Internal

Pelaksanaan pengendalian internal yang efektif dan efisien maka harus mencerminkan keadaan yang ideal. Namun, dalam hal ini sulit dicapai, karena dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian internal harus mempunyai batasan-batasan. COSO (2017:9) dalam Internal Control-Integrated Framework (ICIF) menjelaskan mengenai keterbatasan-keterbatasan pengendalian internal sebagai berikut:

“The Framework recognizes that while pengendalian internal provides reasonable assurance of achieving the entity’s objectives, limitations do exist. Pengendalian internal cannot prevent bad judgment or decisions, or

external events that can cause an organization to fail to achieve its operational goals. In other words, even an effective system of pengendalian internal can experience a failure. Limitations may result from the:

1. *Suitability of objectives established as a precondition to internal control.*
2. *Reality that human judgment in decision making can be faulty and subject to bias.*
3. *Breakdowns that can occur because of human failures such as simple errors.*
4. *Ability of management to override internal control.*
5. *Ability of management, other personnel, and/or third parties to circumvent controls through collusion*
6. *External events beyond the organization's control."*

Berdasarkan uraian COSO diatas, bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya.

Sukrisno Agoes (2012:106) mengatakan bahwa:

“Faktor yang membatasi pengendalian internal adalah biaya pengendalian internal yang tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian entitas tersebut. Meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian internal, pengukuran secara tepat biaya, dan manfaat umumnya dilakukan. Oleh karena itu, manajemen estimasi kualitatif dan kuantitatif semua pertimbangan dalam menilai hubungan biaya-manfaat tersebut.”

Atas dasar penjelasan pengertian dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi keterbatasan pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan perusahaan diabaikan oleh manajemen sehingga menimbulkan kelalaian dan kesalahan dalam pertimbangan yang mengakibatkan gangguan atau kolusi dan juga biaya yang dikeluarkan untuk penerapan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diterima.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (X), Terhadap Deteksi Kecurangan (Y), dengan Pengendalian Internal (M) sebagai variabel *moderating*. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai referensi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Santoso (2015)	Pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal berbasis COSO & dampaknya pada pencegahan kecurangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengendalian internal berbasis COSO sebesar 52,4% dan pengendalian internal berbasis COSO berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan sebesar 56,6% sedangkan sisanya merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel independen yang sedang diteliti.
2	Irma Paramita Sofia, Ghazali Amola (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif signifikan terhadap <i>fraud</i> .hal ini jika kualitas sistem informasi akuntansi meningkat, maka <i>fraud</i> yang dilakukan oleh perusahaan juga akan meningkat.

3	Animah (2018)	Pengaruh sistem informasi akuntansi dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang artinya semakin baik efektivitas pengendalian internal, maka kecenderungan kecurangan akuntansi meningkat.
4	Sari, Mega Dewi Fajar (2018)	Pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi dan kinerja karyawan terhadap keefektifan pengendalian internal perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keefektifan pengendalian internal. Kinerja karyawan tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi dalam mempengaruhi keefektifan pengendalian internal. Tetapi kinerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keefektifan pengendalian internal.
5	Hijratul Aswad, amir Hasan & Novita Indrawati (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Keefektifan Pengendalian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi asimetri memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kepatuhan terhadap aturan akuntansi dan kompensasi kepatuhan

		Internal sebagai Variabel Moderating	memiliki efek negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan efektivitas pengendalian internal memoderasi pengaruh positif asimetri informasi dan pengaruh negatif kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Tetapi efektivitas pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh negatif dari kepatuhan terhadap aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
6	Darmadi Edy (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berbasis Teknologi terhadap Pencegahan Kecurangan yang diModerasi oleh Sistem Pengendalian Internal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis teknologi berpengaruh positif terhadap kecurangan yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal.
7	Meita Sekar Sari, Dwi Anggraeni Saputri (2019)	Pengaruh Pengendalian Internal dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pencegahan Kecurangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pencegahan kecurangan.

8	Priscillia Sumendap, Willy Hidayat, Anggun Prabowo, Hartono, Sartika (2019)	Pengaruh Budaya Organisasi dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderating	Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dengan pengendalian internal sebagai variabel moderating.
9	A. Nadya Nurul Fadila (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan Kecurangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
10	Wachini dan Sri Ayem (2021)	Determinan Kualitas Informasi Akuntansi PT.Sarihuda Yogyakarta dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderating	hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh SDM dan TI terhadap kualitas informasi akuntansi. Serta pengendalian internal mampu memoderasi kedua variabel tersebut terhadap kualitas informasi akuntansi.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pencegahan Kecurangan

Sistem informasi akuntansi sangat penting untuk mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kecurangan. Pada dasarnya sistem informasi akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi dan mengolah

data tentang aktivitas organisasi perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Melihat peran informasi yang begitu tinggi bagi perusahaan maka perusahaan menjadi sangat tergantung kepada sistem informasi akuntansi dan memperlakukan informasi sebagai sumber daya yang sangat berharga untuk menghindari resiko salah satunya yaitu kecurangan.

Pada teori yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart (2012) dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan tidak terlepas dari komponen-komponen sistem informasi akuntansi. Menurut Hall (2010) dalam Khusnul Fuad ditetapkan perusahaan untuk mencapai tujuan umum sebagai berikut:

- a. Menjaga aktiva perusahaan dari tindak kecurangan.
- b. Memastikan keandalan dan akurasi informasi akuntansi.
- c. Mendorong efisiensi operasional perusahaan.
- d. Mengukur kesesuaian kebijakan serta prosedur yang diterapkan untuk manajemen.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara kualitas sistem informasi akuntansi dan pencegahan kecurangan.

2.3.2 Pengendalian Internal memoderasi Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pencegahan Kecurangan

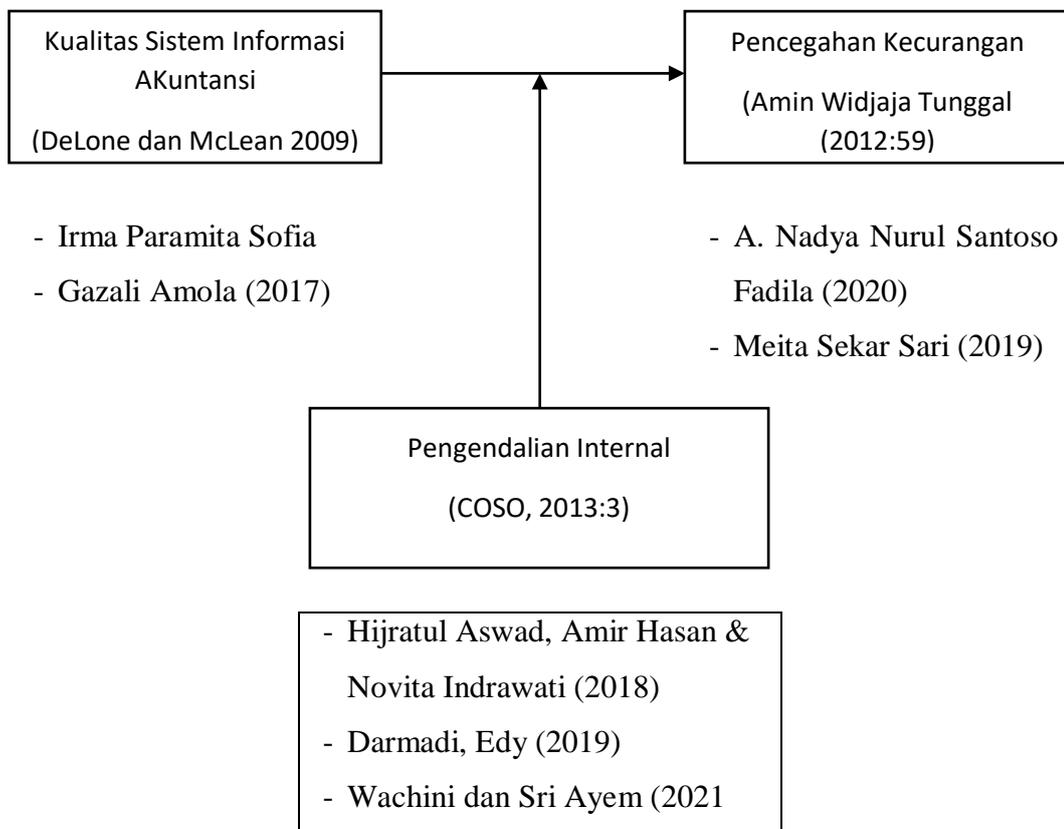
Sistem Informasi Akuntansi merupakan asset yang terlindungi, terintegrasi dan mendorong pencapaiannya tujuan organisasi secara efektif dan efisien maka

sistem informasi akuntansi yang berkualitas tersebut membutuhkan adanya pengendalian internal yang dikemukakan oleh Azhar Susanto (2013:57).

Pengendalian internal tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi. Namun pengendalian internal diharapkan mampu mendeteksi indikasi terjadinya kecurangan didalam perusahaan dan dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan dalam pengendalian keputusan. Melalui pngendalian, kecurangan dapat dipecahkan dan dideteksi sedini mungkin oleh pihak perusahaan.

Pengendalian internal yang baik akan dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan. Sebaliknya pengendalian internal yang lemah akan memberikan peluang kepada pegawai maupun manajemen untuk bertindak curang. Pengendalian internal merupakan bagian terpenting bagi suatu organisasi perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan meningkatkan efisiensi kerja. Untuk mencapai efisiensi kerja ini, salah satu alat pengukurnya adalah mendeteksi, mecegah dan mengatasi kecurangan. Dimana untuk melakukan hal itu diperlukan pengendalian internal.

Pengendalian internal merupakan seperangkat prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dilakukan dengan internal kontrol, internal kontrol yang aktif biasanya merupakan bentuk internal kontrol yang paling banyak diterapkan.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawabanyang diberikan baru teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data atau kuesioner. Maka hipotesis simultan yang diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh kualitas sistem infromasi akuntansi terhadap pencegahan kecurangan

Hipotesis 2: Pengendalian internal memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan kecurangan.